



**DARI SEKOLAH GURU KEPANDAIAAN PUTRI (SGKP) KE SEKOLAH  
KESEJAHTERAAN KELUARGA ATAS (SKKA) PIUS X:  
STUDI LEMBAGA PENDIDIKAN KEJURUAN SWASTA KATOLIK  
DI MAGELANG TAHUN 1953-1964**

**Skripsi**

**Disusun untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan  
guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata-1 dalam Ilmu Sejarah**

**Disusun oleh:**

**SITI MUNAWAROH  
NIM 13030113120039**

**FAKULTAS ILMU BUDAYA UNIVERSITAS DIPONEGORO  
SEMARANG**

**2019**

## **PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Dengan ini saya, Siti Munawaroh menyatakan bahwa karya ilmiah/ skripsi ini adalah asli hasil karya saya dan karya ilmiah ini belum pernah diajukan sebagai pemenuhan persyaratan untuk memperoleh gelar kesarjanaan baik Strata Satu (S1), Strata Dua (S2), maupun Strata Tiga (S3) pada Universitas Diponegoro maupun perguruan tinggi lain.

Semua informasi yang dimuat dalam karya ilmiah ini yang berasal dari penulis lain; baik yang dipublikasikan maupun tidak, telah diberikan penghargaan dengan mengutip nama penulis secara benar dan semua isi karya ilmiah/skripsi ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya pribadi sebagai penulis.

Semarang, Oktober 2019

Penulis,

Siti Munawaroh

NIM 13030113130069

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto:

*“Simplicity is more than enough”*

**Anonim**

Dipersembahkan untuk:

Ibu, Bapak, Kakak dan Adik serta semua orang yang telah menjadi bagian dari perjalanan hidup saya.

Disetujui oleh:  
Dosen Pembimbing,

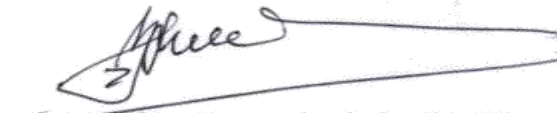



Prof. Dr. Sutejo K. Widodo, M.Si.  
NIP 19600515 198503 1 004

Skripsi dengan judul “Dari Sekolah Guru Kepandaian Putri (SGKP) ke Sekolah Kesejahteraan Keluarga Atas (SKKA) Pius X: Studi Lembaga Pendidikan Kejuruan Swasta Katolik di Magelang Tahun 1953-1964” yang disusun oleh Siti Munawaroh (13030113130069) telah diterima dan disahkan oleh panitia ujian skripsi program Strata-1 Departemen Sejarah Fakultas Ilmu Budaya Universitas Diponegoro pada November 2019.

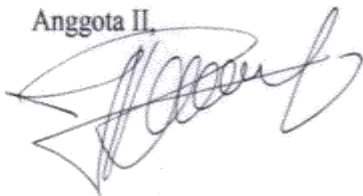
Ketua,

Anggota I,

  
Prof. Dr. Yety Rochwulaningsih, M.Si.  
NIP 19610605 198603 2 001

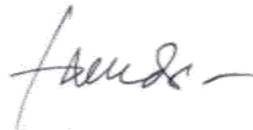
  
Prof. Dr. Sutejo K. Widodo., M.Si.  
NIP 19600515 198503 1 004

Anggota II,



Dr. Haryono Rinardi, M.Hum.  
NIP 19670311 199303 1 004

Anggota III,



Mahendra Puji Utama, S. S., M. Hum.  
NIP 19710224 199903 1 001

Mengesahkan,  
Dekan  
  
Dr. Nurbayati, M. Hum.  
NIP 196610041990012001

## KATA PENGANTAR

*Bismillahirrahmaanirrahiim,*

Syukur alhamdulillah penulis sampaikan ke hadirat Allah SWT karena penulis dapat menyelesaikan skripsi berjudul “Dari Sekolah Guru Kepandaian Putri (SGKP) ke Sekolah Kesejahteraan Keluarga Atas (SKKA) Pius X: Studi Lembaga Pendidikan Kejuruan Swasta Katolik di Magelang Tahun 1953-1964”. Skripsi ini disusun untuk menempuh ujian akhir Program Strata-1 Sejarah pada Departemen Sejarah Fakultas Ilmu Budaya Universitas Diponegoro.

Melalui kesempatan ini, penulis menyampaikan terima kasih atas bantuan, bimbingan, dan petunjuk baik berupa materiil maupun spriritual, kepada yang terhormat: Dr. Nurhayati, M. Hum., selaku Dekan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Diponegoro dan Dr. Dhanang Respati Puguh, M. Hum., selaku Ketua Departemen Sejarah Fakultas Ilmu Budaya Universitas Diponegoro, yang telah berkenan memberikan izin dan kemudahan bagi penulis dalam penulisan skripsi ini. Terima kasih untuk Prof. Dr. Sutejo Kuwat Widodo, M.Si. selaku dosen pembimbing sekaligus dosen wali yang dengan sabar memberikan bekal keilmuan, pengarahan, bimbingan selama penulisan skripsi ini juga memberikan perhatian terhadap perkembangan akademik penulis.

Terima kasih juga penulis sampaikan kepada segenap dosen penguji: Prof. Dr. Yety Rochwulaningsih, M.Si., Dr. Haryono Rinardi, M.Hum., Mahendra Pudji Utama, S. S., M. Hum., dan Prof. Dr. Sutejo K. Widodo, M.Si., yang telah memberikan saran dan kritik yang membangun untuk perbaikan skripsi ini.

Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada segenap pengajar Departemen Sejarah Fakultas Ilmu Budaya Universitas Diponegoro yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu atas bekal ilmu pengetahuan yang telah diberikan selama menjadi mahasiswa. Ucapan terima kasih juga penulis haturkan untuk segenap staf administrasi Departemen Sejarah Fakultas Ilmu Budaya Universitas Diponegoro yang telah memberikan pelayanan yang maksimal.

Selanjutnya penulis mengucapkan terima kasih yang tidak terhingga kepada kedua orang tua penulis yang luar biasa, Bapak Su'udi dan Ibu Marwiyah atas do'a dan dorongannya yang selalu mengiringi perjalanan penulis selama ini. Kepada kakak dan adik penulis terima kasih atas motivasi dan dorongan semangatnya untuk menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada rekan di Departemen Sejarah terutama Aya, Doni, Eca, Nita, teman kelas B yang lain serta teman-teman seperjuangan angkatan 2013.

Kiranya tidak ada hasil yang sempurna tanpa kerja keras dan ketekunan. Banyak juga pekerjaan yang dilakukan dengan sungguh-sungguh masih juga diikuti kesalahan, karena itu penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna karena keterbatasan ilmu dan pengetahuan penulis. Untuk itu penulis dengan hati terbuka mengharapkan saran dan kritik yang bersifat membangun. Akhir kata, semoga skripsi ini bisa bermanfaat bagi kepentingan ilmu pengetahuan, penulis pribadi, dan semua pihak tanpa terkecuali, *amiin ya robbal 'alamiin*.

Semarang, November 2019

Penulis

Siti Munawaroh

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b>	i
<b>HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI</b>	ii
<b>HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN</b>	iii
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b>	iv
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b>	v
<b>KATA PENGANTAR</b>	vi
<b>DAFTAR ISI</b>	viii
<b>DAFTAR SINGKATAN</b>	x
<b>DAFTAR ISTILAH</b>	xiii
<b>DAFTAR GAMBAR</b>	xvi
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b>	xvii
<b>ABSTRAK</b>	xviii
<b>ABSTRACT</b>	xix
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	1
A. Latar Belakang dan Permasalahan	1
B. Ruang Lingkup	8
C. Tujuan Penelitian	9
D. Tinjauan Pustaka	9
E. Kerangka Pemikiran	17
F. Metode Penelitian	24
G. Sistematika Penulisan	26
<b>BAB II LATAR BELAKANG TERBENTUKNYA SGKP PIUS X MAGELANG</b>	28
A. Latar Belakang Kebijakan Pendidikan Pasca Proklamasi Kemerdekaan	26
B. Keadaan Pendidikan di Magelang Pasca Proklamasi Kemerdekaan	37
C. Penyebaran Agama Katolik di Magelang	40
D. Karya Pendidikan Suster-Suster Carolus Borromeus	46
E. Yayasan Tarakanita Wilayah Jawa Tengah	55
<b>BAB III PERKEMBANGAN SEKOLAH GURU KEPANDAIAN PUTRI (SGKP) PIUS X MAGELANG 1953-1964</b>	58
A. Pendirian SGKP Pius X Magelang	58
B. Perkembangan SGKP Pius X Magelang	63
1. Tenaga Ajar	64
2. Peserta Didik	65
3. Kurikulum SGKP Pius X Magelang	67
4. Sarana dan Prasarana SGKP Pius X Magelang	74
a. Gedung Sekolah	74
b. Buku Penunjang Pembelajaran	76



c. Asrama	77
d. Sekolah Kepandaian Putri Tarakanita	79
C. Perubahan Kebijakan Pemerintah	80
D. Masa Transisi dari SGKP ke SKKA Pius X Magelang	86
<b>BAB IV UPAYA PERALIHAN SGKP PIUS X MENJADI SKKA PIUS X MAGELANG</b>	<b>88</b>
A. Upaya Masa Peralihan	88
1. Kurikulum	89
2. Perubahan Pembelajaran Praktik	92
3. Pelatihan Tenaga Ajar	96
B. Dampak Perubahan SGKP Pius X menjadi SKKA Pius X Magelang	98
1. Penutupan SKP Tarakanita	98
2. Perubahan Pendidikan Kepandaian menjadi PKK	99
<b>BAB V SIMPULAN</b>	<b>105</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	<b>106</b>
<b>DAFTAR INFORMAN</b>	<b>113</b>
<b>LAMPIRAN</b>	<b>114</b>

## DAFTAR SINGKATAN

AAL	: Akademi Angkatan Laut
AAU	: Akademi Angkatan Udara
AMN	: Akademi Militer Nasional
AMS	: <i>Algemeene Meddlebare School</i>
CB	: Carolus Borromeus
FIC	: <i>Fratres Immaculatae Conceptionis</i>
FKIP	: Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
GOSVO	: <i>Governemen Opleiding School voor Vak Onderwyzeressen</i>
GPIB	: Gereja Protestan di Indonesia Bagian Barat
HBS	: <i>Hogere Burger School</i>
HCS	: <i>Hollands Chinese School</i>
HIS	: <i>Hollands Inlandse School</i>
Jl.	: Jalan
KNIP	: Komite Nasional Indonesia Pusat
KODIM	: Komando Distrik Militer
KPKPKB	: Kursus Pengajar untuk Kursus Pengantar kepada Kewajiban Belajar
KS	: <i>Kweekschool</i>
Mgr.	: Monsigneur
MPR	: Majelis Permusyawaratan Rakyat
MVS	: <i>Meisjes Vervolg School</i>
NS	: <i>Noormal School</i>
OSC	: <i>Ordo Sanctae Crucis</i>
OSF	: Ordo Suster-suster Santo Fransiskus
OSVO	: <i>Opleiding School vor Onderwijzeressen</i>
OVVO	: <i>Opleiding voor Voorbereidens Onderwijs</i>

PGPLB	: Pendidikan Guru Pendidikan Luar Biasa
PGSLP	: Pendidikan Guru Sekolah Lanjutan Pertama
PKK	: Pendidikan Kesejahteraan Keluarga
PP dan K	: Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan
PTIK	: Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian
RKZ	: <i>Rooms Katholiek Ziekenhuis</i>
RS	: Rumah Sakit
SCJ	: <i>Sacerdotum a Sacro Corde Jesu</i>
SD	: Sekolah Dasar
SGA	: Sekolah Guru A
SGB	: Sekolah Guru B
SGC	: Sekolah Guru C
SGKP	: Sekolah Guru Kepandaian Putri
SGKPN	: Sekolah Guru Kepandaian Putri Negeri
SGPD	: Sekolah Guru Pendidikan Djasmani
SGTK	: Sekolah Guru Taman Kanak-Kanak
SGTP	: Sekolah Guru Tinggi Putri
SJ	: Sarekat Jesus
SKK	: Sekolah Kesejahteraan Keluarga
SKKA	: Sekolah Kesejahteraan Keluarga Atas
SKP	: Sekolah Kepandaian Putri
SLTP	: Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama
SMA	: Sekolah Menengah Atas
SMK	: Sekolah Menengah Kejuruan
SMP	: Sekolah Menengah Pertama
SPG	: Sekolah Pendidikan Guru
SR	: Sekolah Rakyat

Sr. : Suster  
St. : Santo  
TK : Taman Kanak-Kanak  
TP : Tentara Pelajar  
UU : Undang-Undang

## DAFTAR ISTILAH\*

<i>Atelier</i>	: Kata dalam bahasa Perancis yang berarti tempat kerja, bengkel atau workshop. Dalam tata busana berarti rumah mode atau tempat yang biasa digunakan untuk merancang mode pakaian.
<i>Bakery</i>	: Bagian dari <i>pastry</i> yang bertanggung jawab membuat produk berbahan roti dan disajikan setelah di <i>oven</i> atau <i>baking</i> .
Biara	: Rumah komunitas hidup religius.
Boga	: Makanan.
Bruder	: Kata dalam bahasa Belanda yang berarti saudara lelaki, nama panggilan bagi seorang rohaniawan Katolik awam (tidak ditahbiskan) yang menjalani kaul kemiskinan, selibat, dan ketaatan. Seorang bruder biasanya tinggal dalam suatu komunitas dan menjadi anggota penuh dari ordo atau tarekat
Busana	: Pakaian, baju.
Carolus Borromeus	: Nama orang Kudus dalam tradisi Gereja Katolik, biasa disebut santo atau santa. Carolus Borromeus adalah seorang uskup di Milan pada abad 16 dan dijadikan nama pelindung tarekat suster-suster dari Maastricht Belanda yakni Tarekat Carolus Borromeus.
<i>Catering</i>	: Wirausaha yang melayani pemesanan berbagai macam masakan (makanan dan minuman) baik untuk pesta maupun untuk penunjang kebutuhan suatu instansi.
<i>Civics</i>	: Istilah untuk merujuk penamaan dari program pendidikan kewarganegaraan.
Gereja	: Sebutan untuk gedung tempat ibadat umat Kristiani atau sebutan untuk umat Kristen secara keseluruhan.
<i>Home Economics</i>	: Ekonomi rumah tangga, ilmu domestik yang berkaitan dengan hubungan antarindividu, keluarga, komunitas, dan lingkungan tempat mereka tinggal.
Keuskupan	: Wilayah yang berada di bawah yuridiksi uskup atau uskup agung, yang memimpin atas namanya sendiri bukan mewakili siapa pun.
<i>Kokumin gakko</i>	: Sekolah Rakyat tingkat dasar pada masa Jepang.

---

\*Pengertian dalam daftar istilah ini disusun berdasar pada pendapat para ahli dalam kamus, referensi, dan pendapat pribadi.

Konfeksi	: Pakaian dan sebagainya yang dibuat secara massal yang dijual dalam keadaan jadi, tidak diukur menurut pesanan, tetapi menurut ukuran yang sudah ditentukan.
Kongregasi	: Perkumpulan para biarawan, biarawati, rohaniawan atau rohaniawati Katolik dari satu kesatuan khusus.
Konsili	: Sidang para uskup untuk mengambil sikap dan keputusan mengenai masalah ajaran iman, tata tertib dan tindakan pastoral serta administratif yang mendesak.
<i>Leer plan</i>	: Kata dalam bahasa Belanda yang berarti rencana pelajaran.
Misi	: Istilah dalam bahasa Indonesia untuk kata Latin <i>missio</i> yang berarti perutusan. Merupakan kegiatan yang lebih luas dan umum, yakni menyangkut kegiatan gerejawi, maupun karya khusus pewartaan dan penyebaran iman Kristen.
Misionaris	: Utusan untuk mewartakan iman Kristiani kepada orang yang belum mengenal Kristus, tujuannya adalah membentuk jemaat Kristen setempat yang dapat berdiri sendiri.
<i>Missie overste</i>	: Pengawas tinggi untuk para misionaris.
Ordo	: Sebutan untuk kelompok atau komunitas hidup religius sebelum tahun 1700.
Paroki	: Suatu tipe pembagian administratif.
Partikelir	: Bukan untuk umum, bukan kepunyaan pemerintah, swasta.
Pastoral	: Pelayanan gereja untuk umat atau jemaat oleh para pendeta.
<i>Pastry/Patiseri</i>	: Kata dalam bahasa Perancis <i>patisserie</i> yang artinya kue-kue. Patiseri dapat dikatakan sebagai ilmu yang mempelajari seluk beluk kue, baik kue kontinental, oriental, maupun kue Indonesia. Patiseri biasanya dibuat dari campuran tepung terigu, cairan dan lemak. Pembuatan <i>pastry</i> mengacu pada berbagai adonan ( <i>paste and dough</i> ).
Pastur	: Sebutan bagi pemimpin agama atau imam di lingkungan Gereja Katolik Roma
Paus	: Uskup Roma, Uskup Kepala dan pemimpin Gereja Katolik Roma.
Romo	: Sebutan bahasa Jawa untuk Imam atau Pastor.

Sarikat Yesus	: Merupakan salah satu ordo dalam Gereja Katolik yang didirikan oleh Ignasius Loyola bersama 6 kawannya dan disahkan pada 1540 oleh Paus Paulus III.
<i>Separate subject curriculum</i>	: Penyajian mata pelajaran dalam bentuk subjek-subjek atau mata pelajaran tertentu. Masing-masing mata pelajaran adalah unit yang terpisah.
Spiritualitas	: Salah satu sudut (cara) pandang sekaligus model penghayatan iman akan Yesus Kristus serta tradisi sehat yang merasuki dan begitu mengerahkan seluruh pribadi (jiwa, raga, pikiran, perasaan, cita-cita dan kekuatan).
Suster	: Para suster disebut juga biarawati. Mereka adalah perempuan yang mempersembahkan hidup mereka untuk Tuhan dan Gereja dengan mengucapkan kaul atau janji untuk hidup miskin, taat dan salibat. Para suster tergabung dalam berbagai macam kongregasi atau ordo. Nama kongregasi atau ordo ditulis dalam bentuk singkatan di belakang nama mereka seperti Santo Paulus Chartres (SPC), Abdi Kristus (AK), Carolus Borromeus (CB) dan sebagainya.
Susteran	: Tempat tinggal biarawati. Biasanya terdapat sekolah di dalamnya sehingga susteran sering disebut sebagai sekolah yang dikelola oleh biarawati.
Tarekat	: Persekutuan atau persaudaraan orang yang bersama-sama menurut aturan hidup sesuai dengan iman mereka. Tarekat biasa digunakan oleh kelompok hidup religius (suster atau bruder) sebagai terjemahan dari <i>societas</i> atau <i>communitas</i> .
Tionghoa	: Salah satu etnis di Indonesia yang asal usul leluhur mereka berasal dari Tiongkok.
Uskup	: Orang yang ditahbiskan untuk menerima imamat dan ditunjuk untuk memimpin suatu keuskupan dengan pelayanan, pengajaran, reksa pastoral, dan ibadah.
Vikariat Apostolik	: Merupakan wilayah dalam Gereja Katolik yang belum cukup berkembang menjadi keuskupan yang swadaya.
<i>Voolkschool</i>	: Sekolah Rakyat, yang digunakan untuk mendidik anak-anak pribumi pada masa Hindia Belanda.

## DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar:	
3.1 Mgr. Albertus Soegijapranata, SJ	58
3.2 Mgr. Albertus Soegijapranata, SJ duduk di tengah memakai kacamata bersama para siswi SGKP Pius X Magelang tahun 1958	65
3.3 Warga SGKP Pius X dekade 50-an	67
3.4 Siswa Jurusan Tata Busana sedang melaksanakan tugas praktik gaya tempo dulu dengan peralatan sederhana	70



## DAFTAR LAMPIRAN

		Halaman
Lampiran		
A	UU Nomor 12 Tahun 1954 tentang Pernyataan Berlakunya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1950 dari Republik Indonesia dahulu tentang Dasar-dasar Pendidikan dan Pengajaran di Sekolah untuk Seluruh Indonesia	115
B	Surat Permohonan mendirikan SGKP	119
C	Daftar nilai ujian praktek SGKP Pius X bagian Rumah Tangga milik Clara Mentasir	120
D	Surat Keputusan Pembukaan SKP Tarakanita di Magelang	121
E	Ketetapan MPRS RI No. I/MPRS/1960 tentang Manifesto Politik RI sebagai GBHN	122
F	Raport SKKA Pius X milik Prijanti Dwi Astuti	124
G	Surat Pernyataan SGKP Pius X menjadi ke SKKA Pius X	125
H	SK Menteri Pendidikan. Pengajaran dan Kebudayaan tentang pemberian bantuan kepada SGKP Pius X Magelang	126
I	Ijazah SGKP Pius X bagian Rumah Tangga milik Clara Mentasir	127
J	Piagam pendaftaran ulang SKKA Pius X ke sekolah swasta kejuruan di Jawa Tengah	128
K	Penetapan Presiden RI No.I Tahun 1960 tentang GBHN	129
L	Ketetapan MPRS RI No. II/MPRS/1960 tentang Garis-garis Besar Pola Pembangunan Nasional Semesta Berencana Tahapan Pertama 1961-1969	130

## ABSTRAK

Skripsi berjudul “Dari Sekolah Guru Kepandaian Putri (SGKP) ke Sekolah Kesejahteraan Keluarga Atas (SKKA) Pius X: Studi Lembaga Pendidikan Kejuruan Swasta Katolik di Magelang Tahun 1953-1964” ini menyajikan permasalahan tentang bagaimana perkembangan SGKP Pius X selama 1953 hingga 1964 dan mengapa terjadi perubahan dari SGKP ke SKKA Pius X. Guna mengkaji permasalahan tersebut dalam skripsi ini digunakan metode sejarah yang terdiri atas heuristik, kritik, interpretasi, dan historiografi. Sejumlah pendekatan yang digunakan dalam skripsi ini meliputi ilmu institusi dan ilmu pendidikan khususnya konsep tentang sekolah sebagai sistem dan norma agama.

Kegiatan pendidikan yang diselenggarakan oleh Misionaris Katolik di Magelang telah ada sejak datangnya Pastor Van Lith, SJ pada tahun 1896. Banyak sekolah Katolik yang didirikan oleh Kongregasi Katolik untuk menerima khusus siswa laki-laki. Hingga tahun 1927 hanya ada satu sekolah khusus putri yaitu *Internaat Mendoet* di Muntilan. Hal ini yang mendorong Mgr. Soegijapranata sebagai pimpinan Vikariat Apostolik Semarang datang menawarkan kepada Tarekat Carolus Borromeus untuk mendirikan sekolah kepandaian putri setelah pasca proklamasi kemerdekaan.

Hasil penelitian skripsi ini menunjukkan bahwa SGKP Pius X telah berhasil berdiri atas prakarsa Mgr. Soegijapranata. Karya pendidikan Suster-Suster Carolus Borromeus diwujudkan melalui pengetahuan teori dan ketrampilan praktis agar memiliki kompetensi keahlian dan perilaku dalam bidang kerumahtanggaan sesuai dengan semangat dasar pendiri Kongregasi Carolus Borromeus. Sistem pendidikan di SGKP Pius X terdiri dari beberapa unsur yaitu tenaga ajar, peserta didik, kurikulum, sarana dan prasarana. Perkembangan sekolah ini tidak terlepas dari pihak Yayasan Tarakanita yang menjadi wadah SGKP Pius X serta bantuan dari pemerintah. Sekolah ini berupaya menyesuaikan diri dengan kebijakan pendidikan kejuruan di seluruh Indonesia. Diberlakukannya Ketetapan MPRS RI No. I/MPRS/1960 tentang Manifesto Politik RI sebagai GBHN menjadi dasar perubahan sistem pendidikan, sehingga SGKP Pius X beralih menjadi SKKA Pius X. Upaya yang dilakukan masa peralihan menjadi SKKA Pius X diantaranya adalah mengalihkan pendidikan guru kepandaian menjadi pendidikan kejuruan, mengubah sistem pengajaran dan memperbaiki kurikulum yang lebih berorientasi pada kebutuhan ketrampilan industri dan kesejahteraan keluarga. Hasil skripsi ini menyimpulkan bahwa SGKP Pius X telah menyelenggarakan pendidikan sesuai kebijakan pemerintah sejak tahun 1953, perubahan SGKP Pius X tidak terjadi karena faktor dari dalam sekolah ataupun tarekat melainkan faktor luar yang dalam pelaksanaannya pendidikan di Indonesia memang telah diatur oleh kebijakan Undang-Undang yang berlaku pada tahun 1960.

## **ABSTRACT**

*This Thesis entitled "From the Women's Skill Teacher School (SGKP) to the Family Welfare High School (SKKA) Pius X: Study of Catholic Private Vocational Education Institutions in Magelang in 1953-1964" presents a discussion about how the development of SGKP Pius X from 1953 to 1964 and why changes occurred from SGKP to SKKA Pius X. To examine those issues, this thesis uses the historical method that consist of heuristics, source criticism, interpretation, and historiography. Several scientific approaches are used in this thesis included institutional and educational sciences, especially the concept of schools as religious systems and norms.*

*Educational activities organized by Catholic Missionaries in Magelang have existed since the arrival of Romo Van Lith, SJ in 1896. Many Catholic schools were established by the Catholic Congregation to receive male students. Until 1927 there was only one school for girls namely Internaat Mendoet in Muntilan. This causes Mgr. Soegijapranata as the leader of the Apostolic Vicariate of Semarang came to offer to the Congregation Carolus Borromeus to establish a women's intelligence school after the proclamation of independence. The results of this thesis research show that SGKP Pius X has successfully established the initiative of Mgr. Soegijapranata. The educational of the Sisters of Carolus Borromeus is realized through theoretical knowledge and practical skills in order to have competency expertise and behavior in the field of housekeeping appropriate the basic spirit of the Congregation Carolus Borromeus. The education system at SGKP Pius X consists of several elements namely teaching staff, students, curriculum, facilities and infrastructure. The development of this school is inseparable from the Tarakanita Foundation which is a place for Pius X's SGKP and assistance from the government. This school try to adjust to vocational education policies throughout Indonesia. MPRS RI Decree No.I/MPRS/1960 concerning RI Political Manifesto as GBHN became the basis for changes in the education system, so SGKP Pius X switched into SKKA Pius X. Efforts made during the transition to SKKA Pius X included switching education of intelligence teachers to vocational education, changing teaching systems and improve curriculum that is more oriented to the needs of industry skills and family welfare. The results of this thesis conclude that SGKP Pius X has conducted education according to government policy since 1953, changes to SGKP Pius X did not occur due to factors from within the school or congregation but external factors which in the implementation of education in Indonesia had indeed been governed by the policies of the applied Law in 1960.*

# BAB I

## PENDAHULUAN

### **A. Latar Belakang dan Permasalahan**

Pendidikan adalah salah satu komponen kehidupan yang paling penting dalam membina karakter sebuah bangsa. Penyelenggaraan pendidikan di suatu bangsa menentukan karakter manusia di dalam bangsa itu sendiri. Proses penanaman nilai-nilai hidup pada generasi muda dapat dilakukan sejak dini melalui pendidikan. Hal ini penting mengingat proses pendidikan ikut menentukan kualitas karakter generasi muda. Generasi yang berkualitas menjadi tolok ukur bagi suatu kemajuan bangsa. Pendidikan merupakan hak setiap orang untuk meningkatkan harkat dan martabatnya di dalam kehidupan sehari-hari. Pendidikan tidak hanya berlaku bagi laki-laki saja. Pendidikan bagi perempuan dirasa perlu terutama untuk mengurus urusan domestik atau dalam bahasa lainnya disebut pendidikan rumah tangga. Tujuan pendidikan bagi kaum perempuan adalah mempersiapkan gadis-gadis sebagai calon istri dan ibu yang baik.<sup>1</sup> Pendidikan “keperempuanan” yang dimaksud adalah pendidikan yang dibangun untuk memberikan keahlian bagi perempuan seperti menjahit, memasak dan pekerjaan rumah tangga. Pendidikan sejenis ini mulai ada sejak masa Hindia-Belanda dan tetap berlanjut hingga Pemerintahan Indonesia terbentuk. Pemikiran mengenai persamaan hak dalam memperoleh pendidikan bagi perempuan di Indonesia telah dipelopori oleh beberapa tokoh emansipasi wanita seperti R.A. Kartini, Dewi Sartika, Rohana Kudus, dan sebagainya walaupun pada masa Hindia-Belanda pendidikan rumah tangga ini telah diselenggarakan.

---

<sup>1</sup>Konsep ini mengacu pada pekerjaan perempuan di lingkungan domestik yakni lingkungan rumah tangganya sendiri. Hal ini disebabkan karena mayoritas adat dan budaya masyarakat Indonesia sekitar tahun 1900 cenderung patriarkat, terutama dari kalangan bangsawan sehingga membagi dimensi kaum perempuan yang lemah gemulai dan kaum laki-laki yang perkasa. Lihat Sartono Kartodirdjo, *Perkembangan Peradaban Priyayi* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1987), hlm. 13.

Pada awal kemerdekaan para ahli pendidikan mulai berpikir bahwa perempuan perlu mendapatkan pendidikan yang lebih tinggi. Peningkatan pendidikan bagi perempuan akan menciptakan generasi yang terdidik dengan baik. Pendidikan perempuan dapat diselenggarakan dalam sekolah-sekolah. Sekolah-sekolah ini dapat menerima peserta didik campuran (laki-laki dan perempuan) maupun terpisah. Jenis sekolah terpisah ini ada yang bersifat umum dan kejuruan. Salah satu jenis kejuruan khusus perempuan adalah pendidikan kepandaian putri. Pendidikan kepandaian putri ini berkaitan dengan tugas-tugas perempuan dalam rumah tangga.

Pemerintah Indonesia dengan sadar ingin mengubah keadaan yang kurang tepat. Mereka sadar bahwa penyelenggaraan pendidikan yang bersifat nasional harus segera dimasukkan dalam program perjuangannya. Maka lahirlah sekolah-sekolah partikelir (swasta) atas usaha perintis-perintis kemerdekaan. Sekolah-sekolah itu mula-mula bercorak dua, yaitu sekolah dengan corak yang sesuai dengan haluan politik, dan sekolah yang sesuai dengan tuntutan agama (Islam). Di samping kedua golongan tersebut, banyak pula sekolah partikelir yang tidak mempunyai corak apa-apa. Sekolah-sekolah itu mempunyai rencana pelajaran yang tidak berbeda sedikitpun dengan pelajaran sekolah-sekolah Pemerintah Kolonial. Sekolah-sekolah dari golongan ketiga ini didirikan sekadar untuk memenuhi kebutuhan rakyat Indonesia.<sup>2</sup>

Sekolah partikelir Katolik turut andil dalam memenuhi kebutuhan pendidikan dan pengajaran di Indonesia. Sejak zaman Pemerintahan Kolonial Belanda, kegiatan pendidikan dan pengajaran masih banyak menggunakan sistem stratifikasi sosial, penyelewengan sekolah yang hanya menerima orang-orang Eropa, sedangkan hanya sebagian kecil pribumi yang dapat menempuh pendidikan tersebut. Adanya perlakuan diskriminatif Pemerintah Kolonial memunculkan sekolah partikelir yang membuka kesempatan bagi siapa saja untuk menempuh pendidikan seperti orang-orang Eropa. Sekolah-sekolah yang didirikan

---

<sup>2</sup> I. Djumhur dan Danasuparta, *Buku Pelajaran Sejarah Pendidikan* (Bandung: CV Ilmu, 1976), hlm. 149.

oleh misionaris Katolik antara lain HIS (*Hollands Inlandse School*), HBS (*Hogere Burger School*), dan AMS (*Algemeene Meddlebare School*). Tidak terkecuali pendirian sekolah kewanitaan seperti Sekolah Guru Kepandaian Putri (SGKP). Sekolah-sekolah ini mendorong kaum pribumi untuk memasukkan putra-putrinya ke dalam sekolah partikelir.

Penyediaan atau pendirian sekolah-sekolah kejuruan yang didirikan para misionaris dianggap sangat penting karena memberi kesempatan pada masyarakat untuk memilih sekolah yang lebih mendekati bakat dan kemampuan masing-masing siswa.<sup>3</sup> Pada zaman Belanda hanya ada dua sekolah semacam SGKP, bernama GOSVO (*Governemen Opleiding School voor Vak Onderwyzeressen*) di Jakarta dan OSVO (*Opleiding School voor Onderwijzeressen*) di Surabaya.<sup>4</sup> SGKP setingkat dengan sekolah menengah atas. SGKP diklasifikasikan dalam pendidikan menengah bagian kejuruan.<sup>5</sup> Sekolah ini memberi pendidikan kepada perempuan untuk bekerja, mendirikan usaha, maupun keahlian yang berkaitan dengan kerumahtanggaan. SGKP juga memberi pendidikan dengan berbagai bentuk keterampilan sebagai calon guru di Sekolah Kepandaian Putri (SKP). Pendidikan kejuruan atau kepandaian putri memiliki berbagai macam materi. Kejuruan tersebut misalnya memasak, menjahit, memimpin rumah tangga, mengasuh anak-anak, dan kerajinan. Selain itu terdapat keterampilan untuk membuka atau membantu dalam industri. Industri yang dimaksud adalah batik,

---

<sup>3</sup>Maria Octavia Sripurwandari, "Sekolah Guru Kepandaian Putri Mater Amabilis Surabaya Tahun 1964-1967", (Skripsi pada Jurusan Sejarah Fakultas Ilmu Budaya Universitas Airlangga Surabaya, 2016).

<sup>4</sup>Tim Buku Kenangan, *Kenangan Syukur SGKP-SKKA-SMKK-SMK Pius X: Tak Kenal Lelah Berjalan dalam Kasih* (Magelang, 2013), hlm. 20.

<sup>5</sup>Sistem persekolahan tahun 1945-1950 terdiri dari pendidikan rendah, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Jenjang pendidikan menengah terdiri dari bagian umum, kejuruan, dan keguruan. Lihat Redja Mudyahardjo, *Pengantar Pendidikan Sebuah Studi Awal Tentang Dasar-dasar Pendidikan Pada Umumnya dan Pendidikan di Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 373.

anyaman, dan kerajinan. Pengajar-pengajar untuk pendidikan itu disiapkan di SGKP.<sup>6</sup>

Dibangunnya sekolah-sekolah kejuruan itu tidak terlepas dari didirikannya *Instituut voor de Opleiding van Jonge-juffrouwen* (Institut untuk Wanita-wanita muda) tahun 1824 yang merupakan pendidikan kejuruan berbasis wanita yang didirikan oleh orang Eropa pertama kali di Batavia.<sup>7</sup> Sementara itu sekolah kejuruan negeri didirikan pada tahun 1853 dengan nama *Ambacht School van Soerabaja* yang merupakan sekolah kejuruan negeri pertama di Indonesia.<sup>8</sup> Sekolah yang didirikan oleh masyarakat pribumi dipelopori oleh R.A. Kartini yang mendirikan Sekolah Gadis di Jepara dan Rembang tahun 1903. Sepaham dengan pandangan R.A. Kartini bahwa perempuan berhak untuk memperoleh pendidikan yang sama dengan laki-laki, pada 1904 Dewi Sartika juga mendirikan sekolah untuk istri. Hingga tahun 1912 di Pasundan telah berdiri 9 Sekolah Istri Dewi Sartika. Pada 1914 sekolah tersebut berganti menjadi Sekolah Keutamaan Istri kemudian Sekolah Kepandaian Putri (SKP).<sup>9</sup> Tahun 1918 Pemerintah Hindia Belanda kemudian memberikan perhatian pada bidang kejuruan dengan didirikannya *Lagere Nijverheidschool voor Meisjes* (Sekolah Kepandaian Puteri).<sup>10</sup>

Pada masa pendudukan Jepang banyak sekolah swasta yang ditutup. Semua kegiatan pemerintahan di Indonesia beralih pada kekuasaan Jepang yang

---

<sup>6</sup>Soegarda Poerbakawatja, *Pendidikan dalam Alam Indonesia Merdeka* (Jakarta: Gunung Agung, 1970), hlm. 251.

<sup>7</sup>Wardiman Djojonegoro, *Lima Puluh Tahun Perkembangan Pendidikan Indonesia* (Jakarta: Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan, 1996), hlm. 22.

<sup>8</sup>Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Pendidikan di Indonesia dari Jaman ke Jaman* (Jakarta: Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan, 1979), hlm. 53.

<sup>9</sup>Muhammad Rifa'i, *Sejarah Pendidikan Nasional: Dari Masa Klasik Hingga Modern* (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2011), hlm. 101.

<sup>10</sup>Djojonegoro, *Lima Puluh Tahun Perkembangan Pendidikan Indonesia*, hlm. 32.

dibumbui dengan kemiliteran. Gedung-gedung pendidikan ditutup, dihancurkan, dan diambil sebagai markas kemiliteran. Ada pula gedung bekas operasional tentara Belanda yang digunakan untuk sekolah-sekolah yang menyiapkan tenaga insinyur dan dokter demi kepentingan peperangan. Jepang menginstruksikan untuk menutup sekolah-sekolah yang berbahasa Belanda, pelarangan materi Belanda dan bahasa-bahasa Eropa lainnya. Termasuk yang harus ditutup adalah HCS atau sekolah bagi peranakan Cina.<sup>11</sup> Sekolah harus menanamkan semangat Jepang sebagai bangsa Asia Timur Raya sesuai dengan ideologi Kaisar Jepang.

Sekolah zaman Belanda, HIS yang berbahasa Belanda dengan masa belajar 7 tahun dan sekolah desa yang berbahasa daerah selama 5 tahun disamakan statusnya menjadi *kokumin gakko*<sup>12</sup> dengan masa belajar 6 tahun dengan bahasa Indonesia sebagai bahasa resminya. Meskipun banyak kesempatan untuk menyekolahkan anak-anaknya menempuh pendidikan akan tetapi sekolah tidak berjalan lancar karena guru-guru juga diminta Jepang untuk membantu peperangan sebagai prajurit. Begitu pula dengan sebagian sekolah swasta yang didirikan oleh para misioner bubar dan tidak berjalan lagi. Sebagian lagi masih beroperasi akan tetapi di bawah pengaturan pemerintahan Jepang dan harus disesuaikan dengan sekolah negeri. Akan tetapi dengan semua peraturan Jepang yang seperti itu masih ada sisi positif bagi bangsa Indonesia seperti dijadikannya Bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar resmi menggantikan Bahasa Belanda. Sarana dalam pembelajaran di sekolah-sekolah lebih maju karena banyak buku-buku diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dan bahasa Indonesia semakin berkembang secara luas. Selain itu dengan adanya integrasi sistem pendidikan dengan dihapuskannya sistem pendidikan berdasarkan kelas sosial (dualisme

---

<sup>11</sup>Ditutupnya HCS ini mengakibatkan anak-anak keturunan Cina harus kembali ke sekolah-sekolah berbahasa Mandarin di bawah koordinasi Hua-Chino Tsung Hui yang berimplikasi pada adanya proses *resifinacation* (penyadaran dan penegasan identitas sebagai keturunan bangsa China). Lihat Sugiyono dkk., *Peta Jalan Pendidikan Indonesia* (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2002), hlm 55.

<sup>12</sup>Sekolah Rakyat tingkat dasar pada masa Jepang.



pendidikan), membuat anak-anak di Indonesia dapat merasakan pendidikan secara bebas.

Pendidikan kejuruan pada masa Jepang meliputi sekolah lanjutan yang bersifat vokasional antara lain di bidang pertukangan, pelayaran, pendidikan teknik dan pertanian.<sup>13</sup> Akan tetapi jumlah sekolah kejuruan maupun kejuruan sangat terbatas karena kebanyakan siswa dididik bukan untuk menciptakan murid yang cerdas akan tetapi anak-anak Indonesia dijadikan sebagai buruh dan tentara militer untuk membantu Jepang berperang melawan Sekutu. Selain itu sekolah-sekolah yang diselenggarakan oleh pihak swasta dilarang terutama pada tingkat sekolah lanjutan. Tindakan Jepang untuk mengontrol penyelenggaraan pendidikan dikuatkan lagi dengan syarat sekolah swasta yang harus meminta izin ulang pada Jepang agar dapat beroperasi kembali.

Setelah Perang Dunia II di Pasifik berakhir, Jepang menyerah kepada Sekutu pada 15 Agustus 1945. Bersamaan dengan itu para pemimpin nasionalis bangsa Indonesia mengusahakan kemerdekaan. Setelah kemerdekaan 17 Agustus 1945 pemerintah mengusahakan kembali kondisi bangsa di segala bidang. Salah satunya adalah pendidikan. Pendidikan kembali dibuka oleh pemerintah baik yang berpredikat negeri maupun swasta. Banyak lembaga pendidikan yang telah didirikan oleh pemerintah akan tetapi masih ada anak yang belum mendapat tempat untuk belajar. Pemerintah pasca proklamasi kemerdekaan mengalami kendala dana dan kekurangan tenaga pengajar sehingga dibukalah lembaga-lembaga swasta untuk turut membantu menyediakan tempat belajar bagi anak-anak Indonesia. Mereka menyediakan berbagai tingkatan dan jenis sekolah yang waktu itu sangat dibutuhkan oleh anak-anak. Salah satunya ialah pembukaan kembali Sekolah Kepandaian Putri yang sempat tutup masa pendudukan Jepang.

Pendidikan kejuruan antara tahun 1945-1950 digolongkan menjadi dua yaitu pendidikan ekonomi dan pendidikan kewanitaan. Pendidikan kewanitaan ini meliputi Sekolah Kepandaian Putri (SKP) dan Sekolah Guru Kepandaian Putri (SGKP). Jumlah SGKP di Indonesia pada masa awal kemerdekaan tidak banyak.

---

<sup>13</sup>Sugiyono dkk, *Peta Jalan Pendidikan Indonesia* (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2002), hlm. 54.

Jumlah SGKP Negeri di seluruh Indonesia hingga tahun pelajaran 1954/1955 hanya 6 sekolah, sementara SGKP swasta berjumlah 4 sekolah. Keseluruhan jumlah SGKP di Indonesia hingga tahun 1955 hanya ada 10 sekolah.<sup>14</sup> SGKP negeri hanya terdapat di kota Jakarta, Bandung, Yogyakarta, Surakarta, Surabaya, dan Makassar; sedangkan SGKP swasta berada di Surabaya, Malang, Medan, dan Magelang. Semua SGKP swasta tersebut dikelola oleh umat Katolik.

Sekolah-sekolah yang didirikan oleh pemerintah maupun para misionaris sangat dihargai oleh masyarakat sekitar, tidak terkecuali SGKP Pius X Magelang. Sekolah yang dicetuskan oleh Mgr. Soegijapranata<sup>15</sup> itu berdiri pada bulan September tahun 1953 di kompleks persekolahan Jl. Pemoeda Oetara 20 (sekarang Jl. Ahmad Yani No. 20) Magelang.

SGKP Pius X Magelang ini cukup menarik masyarakat sekitar apalagi bagi anak-anak penganut agama Katolik. Selain karena sekolah yang berlandaskan agama Katolik, SGKP Pius X menawarkan program kejuruan yang sangat bermanfaat bagi para gadis terutama jika digunakan untuk mengajar di sekolah kepandaian ataupun untuk menjalankan rumah tangganya kelak. Selain itu pendidikan yang diajarkan oleh pengajar SGKP Pius X bertujuan untuk membina siswa di sekolah agar berkarakter sesuai agama yang diajarkan dan memiliki kualitas pendidikan yang sesuai dengan harapan masyarakat. Misi Suster-suster Carolus Borromeus (CB) ini ternyata mampu melayani kebutuhan pendidikan yang layak dan dianggap memiliki kualitas yang baik.

SGKP Pius X Magelang tentu memiliki dinamika perjalanan yang panjang dengan berbagai faktor yang mempengaruhi keberadaannya. Oleh karena itu persoalan pokok yang menjadi fokus kajian penelitian di dalam skripsi ini adalah

---

<sup>14</sup> Soegarda Poerbakawatja. *Pendidikan dalam Alam Indonesia Merdeka* (Jakarta: Gunung Agung, 1970), hlm. 251.

<sup>15</sup> Mgr. Soegijapranata merupakan Uskup dari Keuskupan Agung Semarang pada saat itu. Paus Pius XII mengangkat Albertus Soegijapranata S.J pada tanggal 4 Agustus 1940 menjadi Vikaris Apostolik Semarang sebagai uskup pribumi pertama. Lihat Th. van den End, *Ragi carita: 1860-sekarang*, vol. 2 (BPK Gunung Mulia, 1999), hlm. 442.

perkembangan SGKP dari tahun 1953 hingga SGKP dialihkan menjadi SKKA Pius X Magelang tahun 1964.

Persoalan tersebut diuraikan melalui pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut. *Pertama*, apa saja yang menjadi latar belakang berdirinya SGKP Pius X Magelang; *Kedua*, bagaimana perkembangan SGKP Pius X Magelang dari tahun 1953 sampai tahun 1964; dan *Ketiga*, apa saja upaya yang dilakukan oleh SGKP Pius X selama masa peralihan menjadi SKKA Pius X.

## **B. Ruang Lingkup**

Pembatasan ruang lingkup dalam penelitian sejarah diperlukan agar penelitian lebih terfokus dan hasilnya dapat dipertanggungjawabkan secara empiris dan metodologis.<sup>16</sup> Penelitian sejarah mengenal tiga ruang lingkup, yakni temporal, spasial dan keilmuan.

Lingkup temporal skripsi ini adalah antara tahun 1953 sampai dengan tahun 1964. Tahun 1953 dipilih sebagai batas awal penelitian karena pada tahun ini SGKP Pius X Magelang didirikan. Tahun 1964 dipilih sebagai batas akhir penelitian karena pada tahun ini SGKP Pius X Magelang resmi ditutup dan berubah nama menjadi SKKA Pius X Magelang.

Ruang lingkup spasial mencakup pada kesatuan wilayah geografis dari suatu wilayah administrasi tertentu. Penelitian ini mengambil daerah kota Magelang sebagai lingkup spasial. Hal ini didasarkan pada alasan bahwa semua kegiatan dan peristiwa yang terjadi hanya dalam lingkup daerah kota Magelang. Sistem pendidikan dan kebijakan lainnya mengenai pelaksanaan sekolah ini hanya diselenggarakan dalam lingkup sekolah dan di sekitar SGKP Pius X Magelang.

Sementara itu, lingkup keilmuan merupakan batasan yang berfungsi sebagai wilayah kegiatan penulisan skripsi dari sudut pandang keilmuan. Ruang lingkup keilmuan dalam penulisan skripsi ini termasuk dalam kajian sejarah institusi. Penggunaan ilmu lain seperti ilmu pendidikan juga sangat dibutuhkan untuk mendukung bahasan masalah yang terkait dengan studi sejarah. Tujuannya

---

<sup>16</sup>Taufik Abdullah (ed.), *Sejarah Lokal di Indonesia* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1985), hlm. 10

agar eksplanasi atas objek dapat lebih jelas. Skripsi ini bertemakan tentang sebuah lembaga formal yang berupa sekolah dalam kiprahnya memajukan peningkatan kehidupan yang lebih baik melalui jalur pendidikan. Hubungan sosial dan interaksi lembaga dengan masyarakat perlu diterangkan dengan ilmu-ilmu sosial agar eksplanasi lebih jelas.

Selain menggunakan ilmu-ilmu sosial penelitian ini menggunakan pendekatan sejarah pendidikan dan agama. Sejarah pendidikan digunakan untuk mengkaji hal-hal yang berkaitan dengan sistem pendidikan, persekolahan atau gagasan-gagasan masyarakat tentang pendidikan, keagamaan dan ilmu pengetahuan. Fokus penelitian ini adalah sekolah Katolik, pendekatan agama diperlukan untuk mengkaji nilai-nilai, aturan ataupun batasan tertentu yang diterapkan oleh agama Katolik.

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasar pada latar belakang permasalahan dan batasan ruang lingkup di atas, dalam penelitian ini akan dikembangkan beberapa tujuan penelitian untuk memperjelas fokus analisis sebagai berikut.

*Pertama*, menguraikan latar belakang didirikannya SGKP Pius X Magelang sebagai salah satu sekolah kejuruan Katolik. *Kedua*, menjelaskan bagaimana perkembangan SGKP Pius X Magelang dari tahun 1953-1964 termasuk di dalamnya apa saja keunggulan-keunggulan yang dimiliki oleh SGKP Pius X. *Ketiga*, menjelaskan faktor penyebab perubahan SGKP ke SKKA Pius X Magelang serta menjelaskan apa saja upaya yang dilakukan oleh SGKP Pius X Magelang selama masa peralihan menjadi SKKA Pius X.

### **D. Tinjauan Pustaka**

Penelitian mengenai pendidikan telah banyak dilakukan. Pustaka yang membahas mengenai pendidikan dan agama telah banyak pula diterbitkan. Salah satu pustaka yang digunakan oleh penulis adalah buku yang berjudul *Pedoman Pelaksanaan Spiritualitas CB untuk Pelayanan Pendidikan* karya dari Provinsialat Suster-suster

Cinta Kasih Santo Carolus Borromeus.<sup>17</sup> Buku ini merupakan referensi utama penulis dalam menjelaskan objek penelitian. Secara khusus buku ini berisi visi dan misi pelayanan pendidikan, unsur-unsur pokok, landasan dokumen dan perwujudan spiritualitas CB dalam pendidikan beserta nilai-nilai yang diperjuangkan.

Komitmen dari Kongregasi Suster-suster Cinta Kasih St. Carolus Borromeus (CB) adalah mengupayakan pelayanan pendidikan bagi generasi muda berdasarkan pengalaman hidup Elisabeth Gruyters, pendiri Kongregasi CB. Nilai-nilai dan keutamaan yang diperjuangkan Elisabeth Gruyters perlu dihidupi sebagai pegangan dan motivasi bagi siapa saja yang terlibat dalam pelayanan pendidikan bersama suster-suster CB. Unsur-unsur pokok spiritualitas CB dalam pelayanan pendidikan meliputi: *pertama*, cinta kasih tanpa syarat dan berbela rasa; *kedua*, iman yang dalam; *ketiga*, menghargai harkat dan martabat manusia; *keempat*, memiliki daya juang dan ketangguhan dalam menghadapi tantangan hidup; *kelima*, memiliki kemauan untuk maju dan berkembang dengan tekun dan sabar; *dan* rela berkorban dan melayani sesama dengan tulus hati. Setiap poin dari keenam unsur ini diuraikan dengan rinci dalam buku ini.

Relevansi dengan topik penelitian adalah buku ini dapat menggambarkan pelaksanaan pendidikan yang dilaksanakan oleh pengelola Yayasan yang berakibat ke sekolah-sekolah Tarakanita. Selain membahas pedoman utama dalam pelayanan pendidikan, sejarah pelayanan mulai dari awal berdirinya di Sumatra hingga pelayanannya di Magelang diuraikan pula akan tetapi hanya sekilas. Buku pedoman ini hanya menjelaskan dari segi religius saja belum ke ranah kehidupan sosial masyarakat yang sebenarnya dan belum disesuaikan dengan kondisi sosial masyarakat setempat.

Pustaka kedua adalah buku terbitan Pustaka Alumni Pius X dengan judul *Perempuan Memandang Dunia Global: Persembahan Alumni Pius X untuk*

---

<sup>17</sup>Surani dkk., *Pedoman Pelaksanaan Spiritualitas CB untuk Pelayanan Pendidikan* (Yogyakarta: CV Media, 2008).

*Almameter Tercinta*.<sup>18</sup> Buku ini berisi sejarah singkat dari sekolah kejuruan Pius X mulai dari pendirian SGKP hingga berubah menjadi SMK Pius X Magelang. Selain dari perkembangan sekolah Pius X, buku ini berisi pengalaman pribadi alumni Pius X dari angkatan pertama hingga sampai ke masa SMK yang sempat mengalami pendidikan di sekolah tersebut. Dari pengalaman tersebut penulis mendapatkan gambaran bagaimana pendidikan awal di SGKP selain dari sudut pandang sekolah, akan tetapi juga dari sudut pandang siswa-siswi yang mengenyam pendidikan di SGKP. Aktualisasi nilai-nilai dari yang diberikan oleh suster CB dalam hal ini diterangkan pula oleh salah seorang mantan kepala SGKP Pius x, Dra.Christera Sri Rudati CB bahwa sekolah membekali siswa dengan nilai-nilai luhur dan pembentukan sikap yang tepat sehingga ketrampilan yang diajarkan menjadi kekayaan berharga dan berarti bagi hidup mereka. Melalui cara-cara tersebut keselamatan diwartakan oleh Pius X.

Ketiga adalah buku *Lima Puluh Tahun Perkembangan Pendidikan di Indonesia* karya Wardiman Djojonegoro.<sup>19</sup> Buku tersebut berisi mengenai semua jalannya pendidikan di Indonesia termasuk di dalamnya adalah perubahan kurikulum dari jaman pemerintah kolonial Belanda hingga masa pemerintahan Soeharto. Salah satu bab buku tersebut membahas mengenai pendidikan Indonesia masa awal kemerdekaan yaitu antara tahun 1945-1968. Pembahasan mengenai bab ini dapat membantu penulis dalam menghubungkan kajian kebijakan pemerintah dengan perubahan-perubahan yang terjadi di SGKP Pius X Magelang terutama kebijakan mengenai sekolah-sekolah kejuruan yakni sekolah kejuruan wanita. Kebijakan perubahan pendidikan yang relevan ada pada uraian mengenai UU RI No. 4 Tahun 1950 Tentang Dasar-Dasar Pendidikan dan Pengajaran di Sekolah. Perubahan sistem pengajaran pada tahun 1960-an dijelaskan dengan

---

<sup>18</sup>Bambang Eka Prasetya, (ed.), *Perempuan Memandang Dunia Global: Persembahan Alumni Pius X untuk Almamater Tercinta* (Jakarta: Pustaka Alumni Pius X, 2003).

<sup>19</sup>Wardiman Djojonegoro, *Lima Puluh Tahun Perkembangan Pendidikan Indonesia* (Jakarta: Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan, 1996).

dikeluarkannya Instruksi Menteri Pendidikan Dasar dan Kebudayaan No. 2 tanggal 17 Agustus 1961 terkait dengan Manipol Usdek (Manifesto Politik Undang-Undang Dasar 1945, Sosialisme Indonesia, Demokrasi Terpimpin, Ekonomi Terpimpin dan Kepribadian Indonesia yang telah disampaikan oleh Presiden Soekarno tahun 1959. Oleh karena itu buku ini sangat relevan dengan topik penelitian karena SGKP Pius X Magelang sendiri berkembang dari awal tahun 1953 hingga 1964.

Pustaka berikutnya buku karya Muhammad Rifa'i yang berjudul *Sejarah Pendidikan Nasional Indonesia dari Masa Klasik Hingga Modern*.<sup>20</sup> Buku ini memberikan gambaran kepada penulis tentang jalannya sistem pendidikan di Indonesia dari masa klasik yaitu zaman Hindu Buddha hingga masa reformasi. Pendidikan yang dijelaskan dalam buku ini lengkap disertai dengan kebijakan pendidikan yang sesuai dengan zamannya. Urutan pendidikan dijelaskan secara detail dan kronologis. Penjelasan mengenai pendidikan di Indonesia khususnya mengenai Sekolah Guru Kepandaian Putri (SGKP) hanya dibahas sedikit akan tetapi mampu menjelaskan secara rinci kebijakan-kebijakan yang mempengaruhi perubahan pada SGKP baik sebelum dan sesudah didirikannya SGKP. Sekolah-sekolah yang didirikan oleh pihak pemerintah maupun swasta dijelaskan secara lengkap seperti sekolah yang didirikan oleh para ulama Islam, misioner Gereja Kristen dan Katolik. Buku ini mencakup sejarah pendidikan nasional, oleh karena itu pendidikan di Magelang hanya disebutkan dalam *spot* atau daerah-daerah tertentu saja. Pustaka ini mampu memberikan gambaran pada penulis mengenai latar belakang pendidikan yang terjadi di Indonesia serta kebijakan dari zaman ke zaman yang sangat mempengaruhi perkembangan SGKP Pius X Magelang.

Pustaka kelima penulis menggunakan buku terbitan Tarakanita Wilayah Jawa Tengah dengan judul *Kenangan Syukur 175<sup>th</sup> Kongregasi Suster-suster CB*

---

<sup>20</sup> Muhammad Rifa'i, *Sejarah Pendidikan Nasional: Dari Masa Klasik Hingga Modern* (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2011).

dan 60<sup>th</sup> Yayasan Tarakanita.<sup>21</sup> Buku ini menyajikan perjalanan Yayasan Tarakanita dalam melayani pendidikan di Jawa Tengah. Uraian mengenai sejarah singkat pendirian sekolah Tarakanita disebutkan pula dalam buku ini. Kilasan singkat sekolah di bawah Yayasan Tarakanita adalah KB-TK Pius X Tarakanita, TK Tarakanita Solo Baru, SD Tarakanita Magelang, SD Tarakanita Solo Baru, SMP Pendowo, SMP Tarakanita Solo Baru, SMP Tarakanita, SMK PIUS X Tarakanita, dan SMA Tarakanita.

Awal pendirian sekolah pertama Tarakanita di Magelang adalah atas saran dari Mgr. Soegijapranata, SJ yang memikirkan kondisi biara suster Fransiskanes yang terbengkalai. Beliau memikirkan bagaimana agar kompleks itu dipakai kembali. Memanfaatkan gedung tersebut Suster-suster CB akhirnya mendirikan Sekolah Guru Kepandaian Puteri yang terus berkembang hingga kini menjadi SMK Pius X. Berlanjut ke pendidikan tingkat dasar yaitu Taman Kanak-kanak Pius X yang semula Taman Kanak-kanak Paroki. Penjelmaan dari SD Pendowo dan SD Katolik Tionghoa adalah SD Tarakanita. Pada awalnya SD Tarakanita ini di cap sebagai sekolah Cina, tahun 1964 membaurkan diri melalui penerimaan siswa baru dari pribumi. Begitu pula dengan pendirian SMP Pendowo yang menjadi SMP Tarakanita. Keterbukaanya dengan penerimaan siswa laki-laki pada 1972 ini membuat arus pendidikan di SMP Tarakanita semakin berkembang dengan baik. Sementara itu kebutuhan pendidikan di lereng Merbabu kurang memadai. SMP Pendowo Ngablak didirikan oleh tokoh lintas agama (Islam, Kristen, Katolik). Sekolah ini sangat sederhana dan dikelola oleh Gereja Papa Miskin. Kurun waktu selanjutnya finansial menjadi masalah utama. Oleh karena itu tahun 1981 SMP Pendowo Ngablak bergabung dengan Yayasan Tarakanita.

Kilasan peran Yayasan dalam pelayanan pendidikannya di Jawa Tengah khususnya Magelang ini dapat menggambarkan perkembangan awal Tarekat CB yang berkarya di Magelang. Sejarah pendirian masing-masing sekolah yang dikelola yayasan menjadi titik tolak perkembangan Yayasan Tarakanita itu sendiri mulai dari pendidikan rendah hingga ke pendidikan tinggi. Visi dan misi Yayasan

---

<sup>21</sup> Tim Penyusun Buku Kenangan, *Kenangan Syukur 175<sup>th</sup> Kongregasi Suster-suster CB dan 60<sup>th</sup> Yayasan Tarakanita* (Magelang: Tim Penyusun, 2012).



Tarakanita merupakan implementasi dari Cinta Kasih St. Carolus Borromeus. Karya-karya yayasan dalam pendidikan adalah dengan mendirikan sejumlah sekolah yang tersebar di beberapa wilayah Indonesia.

Pustaka berikutnya adalah buku berjudul *Kenangan Usia Emas Yayasan Tarakanita Wilayah Yogyakarta* yang diterbitkan oleh Yayasan Tarakanita Kantor Wilayah Yogyakarta. Secara umum pustaka ini menguraikan perjalanan Yayasan Tarakanita atas pelayanan pendidikannya selama 50 tahun kiprahnya di Yogyakarta.

Sejak tahun 1938 Tarekat CB telah mengelola sekolah yang berdiri di Yogyakarta. Sekolah pertama adalah HCS di Loji kecil atau disebut *School voor Chineesche Leerlingen*: sekolah untuk anak Tionghoa. *Volkschool* dan *Meisjes Vervolgschool di Bumijo*, *Standaardschool* menjadi karya sekolah berikutnya. Masa pendudukan Jepang sekolah-sekolah ini tutup. Di sisi lain semangat mendirikan sekolah di Yogyakarta ini muncul dari pembicaraan Sr. Laurentia de Sain dan Sr. Catharina Liedmieir di kamp tawanan Muntok Bangka. Pembicaraan keduanya ini kemudian terkenal dengan istilah “Rencana 10 tahun karya kongregasi di bidang pendidikan” khususnya di Yogyakarta.

Mengutip pendapat dari RJB. Soehendradjati yang memberi kesan pada Yayasan Tarakanita bahwa pluralisme bagi masyarakat Jawa sudah menjadi bagian hidup yang tak terpisahkan dimana sejarah peradaban kerajaan-kerajaan di Jawa tidak pernah lepas dari pengaruh Buddha, Hindu dan Islam. Namun semua pergeseran nilai tersebut justru menjadi kekayaan budaya. Kesenjangan agama yang bisa saja terjadi diatasi dengan pendidikan agama, nilai-nilai iman dalam bentuk religiositas.

Walaupun lingkup buku ini berada di Yogyakarta tetapi buku ini mampu memberikan gambaran perjalanan kisah pelayanan pendidikan yang diterapkan sesuai dasar dan pedoman umum penyelenggaraan pendidikan bagi Yayasan Tarakanita. Pustaka ini mampu memberikan uraian latar belakang dan sejarah didirikannya sekolah Tarakanita di Pulau Jawa. Perjalanan pelayanan pendidikan di Yogyakarta ini tidak terlepas dari yayasan yang ada di wilayah Jawa Tengah yakni di Magelang.

Buku berjudul *Sejarah Pendidikan Daerah Jawa Tengah* yang diterbitkan oleh Departemen Pendidikan Daerah Jawa Tengah menjadi pustaka berikutnya.<sup>22</sup> Pustaka ini menguraikan secara detail dan kronologis mengenai sistem pendidikan mulai dari pendidikan tradisional, pendidikan Barat, pendidikan Kolonial Belanda hingga pendidikan masa Republik Indonesia. Kronologi pendidikan khususnya di Jawa Tengah sangat rinci hingga dituliskan pula sekolah yang dikelola pemerintah ataupun pihak swasta. Gambaran mengenai keadaan umum di Jawa Tengah ketika itu dapat digunakan oleh penulis sebagai acuan dalam mengembangkan sejarah pendidikan di Magelang terutama di masa-masa awal kemerdekaan serta pengaruh dari kebijakan-kebijakan pemerintahan baru. Selain itu dalam pustaka tersebut menjelaskan pula sekolah-sekolah yang didirikan oleh agama Katolik yakni mulai dari zaman kolonial didirikan sekolah khusus putri di Mendut, Muntilan hingga beberapa sekolah Katolik yang menyediakan pendidikan bagi etnis Tionghoa dan sekolah khusus pribumi. Peran dari penyebar misi ini tidak terlepas dari seorang Romo Van Lith, seorang pastur Katolik yang berkiprah menyebarkan agama Katolik di Muntilan, Magelang. Selain membahas sekolah yang berlandaskan agama tertentu buku ini juga menyajikan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah. Tentu buku ini memberikan referensi yang sangat cukup untuk menjelaskan kronologi pendidikan yang diselenggarakan di Jawa Tengah.

Pustaka selanjutnya adalah skripsi karya Maria Octavia Sripurwandari yang berjudul “Sekolah Guru Kepandaian Putri Mater Amabilis Surabaya Tahun 1953-1967.”<sup>23</sup> Pustaka ini sangat penting bagi penulis karena topik penelitian yang ditulis adalah sama, dengan perbedaan nama sekolah dan lokasi penelitian. Selain itu mayoritas siswa yang bersekolah di SGKP Surabaya ini adalah orang Tionghoa sehingga permasalahan yang timbul selain perkembangan SGKP itu

---

<sup>22</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Kebudayaan Daerah, *Sejarah Pendidikan Daerah Jawa Tengah* (Jakarta: Depdikbud, 1980).

<sup>23</sup> Maria Octavia Sripurwandari, “Sekolah Guru Kepandaian Putri (SGKP) Mater Amabilis Surabaya Tahun 1953-1967” (Skripsi pada Jurusan Sejarah Fakultas Ilmu Budaya Universitas Airlangga, 2016).

sendiri juga masalah orang Tionghoa sekaligus dengan peristiwa Gerakan 30 September 1965. Skripsi ini memberikan gambaran penulis bagaimana jalannya pendidikan SGKP kepemilikan Suster waktu itu selain dari SGKP yang ada di Magelang. SGKP dari Surabaya ini juga merupakan salah satu sekolah kejuruan wanita yang didirikan oleh para misionaris Katolik yaitu Suster Lazaris. Sekolah swasta yang berkembang di tengah revolusi bangsa Indonesia ini juga sebagai perbandingan bagaimana penerapan kebijakan pemerintah di berbagai macam sekolah kejuruan wanita.

Skripsi lain yang berkaitan dengan topik penelitian ini adalah “Sekolah Guru Kepandaian Putri Negeri Yogyakarta Tahun 1946-1964” yang ditulis oleh Rosita Nur Ananti.<sup>24</sup> Skripsi ini berisi perkembangan SGKP N Yogyakarta yang pada waktu itu menjadi induk dari semua SGKP swasta di Indonesia. Jalannya pendidikan yang ada di SGKPN serta proses belajar mengajar, fasilitas tidak jauh berbeda dengan SGKP swasta. Relevansi dengan topik penelitian ini adalah penulis dapat mengetahui bagaimana perkembangan SGKPN yang didirikan oleh pemerintah dan kontribusinya bagi SGKP swasta terutama SGKP Pius X Magelang. Penulis dapat membandingkan pula bagaimana sistem pendidikan dan pengorganisasian dari pihak pemerintah dan swasta di Indonesia pada waktu itu. Meskipun produk lulusan SGKP sama tentulah terdapat beberapa perbedaan karena milik swasta lebih berupaya memberikan pendidikan moral serta nilai berdasarkan agama yang diajarkan dan dapat memberikan kesempatan luas bagi siswa beragama minoritas. Kebijakan pemerintah Indonesia sekitar tahun 1960-an mengenai pendidikan kejuruan wanita berakibat SGKP N Yogyakarta ditutup. Akibat penutupan SGKP N ini memberikan dampak bagi SGKP swasta termasuk SGKP Pius X yang awalnya bertahan hingga berubah arah menjadi SKKA sementara itu SGKP N itu sendiri ditutup.

---

<sup>24</sup>Rosita Nur Ananti, “Sekolah Guru Kepandaian Putri Yogyakarta Tahun 1946-1964” (Skripsi pada Jurusan Pendidikan Sejarah Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Yogyakarta, 2013).

### **E. Kerangka Pemikiran**

Skripsi ini membahas tentang SGKP Pius X Magelang sebagai sebuah lembaga pendidikan swasta yang berada di bawah yayasan agama Katolik yaitu Yayasan Tarakanita. SGKP Pius X Magelang berdiri pada tahun 1953. Perubahan kebijakan pemerintah dari tahun ke tahun menimbulkan dampak yang mempengaruhi perkembangan sekolah ini hingga pada 1964 SGKP ditutup dan berubah menjadi SKKA.

SGKP Pius X Magelang dapat diidentifikasi sebagai lembaga sosial. Di dalam sosiologi pada umumnya istilah “lembaga” (sebagai terjemahan bebas dari istilah “institution”) menunjuk pada sebuah gejala yang telah mapan (“established”)<sup>25</sup>. Paul B. Horton dan Chester L. Hunt menyatakan bahwa lembaga adalah sistem hubungan sosial yang terorganisasi yang menjejawantahkan nilai-nilai serta prosedur umum tertentu dan memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar masyarakat.<sup>26</sup> Sejalan dengan hal tersebut Koentjaraningrat menyatakan bahwa lembaga sosial adalah suatu sistem tata kelakuan dan hubungan yang berpusat pada aktivitas-aktivitas untuk memenuhi kompleks-kompleks kebutuhan khusus dalam kehidupan masyarakat.<sup>27</sup> Di dalam sebuah lembaga sosial tentu terdapat peranan intelektual yang menjadi penggerak dan memiliki pengaruh di dalamnya. Pada SGKP Pius X Magelang ini spiritualitas Tarekat Suster-Suster Cintakasih Santo Carolus Borromeus sangat berpengaruh. Karena semangat belarasa mereka sekolah ini didirikan.

Sekolah dapat dikategorikan sebagai pendidikan formal yakni suatu pendidikan yang lokasinya terletak dalam institusi yang disebut sekolah dengan menggunakan kelas tingkat usia pemuda yang diikat dengan kurikulum yang ketat oleh kader-kader guru yang bersertifikat dengan menggunakan metode-metode

---

<sup>25</sup> Soerjono Soekanto, *Beberapa Teori Sosiologi tentang Struktur Masyarakat* (Jakarta: CV. Rajawali, 1983), hlm. 195.

<sup>26</sup> Paul B. Horton, Chester L. Hunt, *Sosiologi*, terjemahan Aminuddin Ram dan Tita Sobari (Jakarta: Erlangga, 1984), hlm. 244.

<sup>27</sup> Koentjaraningrat, *Pengantar Antropologi*, cetakan ke II (Jakarta: UI Press, 1964), hlm. 113.

pendidikan yang standar.<sup>28</sup> Sekolah dipahami sebagai abstraksi nilai di dalam lembaga pendidikan yang berfungsi sebagai aturan bertindak dari masing-masing komponen organisasi. Dalam pandangan umum sekolah sebagai sarana partisipasi masyarakat dalam pembangunan bangsa dan negara.<sup>29</sup>

Robinson menjelaskan bahwa sekolah sebagai lembaga formal memiliki ciri-ciri sebagai berikut: 1) formalitas, 2) hierarkhi, 3) memiliki tujuan kelembagaan yang jelas, 4) lamanya (durasi), dan 5) besar dan kompleksnya.<sup>30</sup> Robinson juga menyatakan bahwa struktur yang longgar menjadi ciri tambahan bagi sekolah sebagai sebuah organisasi yang memiliki penekanan dan kekhasan. Sekolah sebagai organisasi sosial dalam pelaksanaannya tetap dipengaruhi oleh kepribadian sistem tata nilai yang berlaku dan dianut, kultural-biologis dan hubungan personal. Tiap pendidik memiliki kebebasan tertentu untuk menentukan bagaimana dapat mengajar di kelas, walaupun perangkat materialnya telah ditentukan kurikulum di atasnya. Dalam hal ini spesifik sekolah sebagai organisasi memiliki penekanan dan kekhasan sendiri dalam aplikasi sebagai prinsip yang relevan.

Sekolah dapat dipahami sebagai sebuah lembaga, yang dimaksud dengan lembaga di dalam penelitian ini adalah pola perilaku manusia yang mapan, terdiri atas interaksi sosial berstruktur dalam suatu kerangka yang relevan.<sup>31</sup> Talcott Parson menjelaskan bahwa sekolah adalah sistem norma-norma sosial dan hubungan-hubungan yang menyatukan nilai-nilai dan prosedur tertentu dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat. Lembaga-lembaga dikonstruksi dari

---

<sup>28</sup>Sardjan Kadir, *Perencanaan Pendidikan Non Formal* (Surabaya: Usaha Nasional, tt.), hlm. 50.

<sup>29</sup>Etik Mohareni, "Sekolah Khong Kauw (SKK) Semarang 1950-1979: Pembentukan Identitas, Pendidikan Karakter dan Strategi Adaptasi Masyarakat Tionghoa" (Tesis pada Program Pascasarjana Fakultas Ilmu Budaya Universitas Diponegoro, 2012), hlm. 26.

<sup>30</sup>Philip Robinson, *Beberapa Perspektif Sosiologi Pendidikan* (Jakarta: Rajawali, 1986), hlm. 238-239.

<sup>31</sup>Kamus Besar Bahasa Indonesia dalam Jaringan, "Lembaga" (<http://kbbi.web.id/> lembaga dikunjungi pada 25 Oktober 2016).

simbol-simbol bermakna yang bermacam jenisnya, khususnya nilai-nilai yang menyusun sebuah “sistem nilai bersama”. Nilai-nilai ini menyokong komitmen yang dimiliki masyarakat terhadap pola-pola kebudayaan yang lebih luas dan mereka mendefinisikan harapan yang dibangun masyarakat tentang perilaku mereka satu sama lain.<sup>32</sup> Perlu dibedakan antara pola perilaku resmi dengan pola perilaku tidak resmi. Sistem yang menjadi wahana yang memungkinkan masyarakat untuk berinteraksi menurut pola-pola resmi adalah institusi atau dalam bahasa antropologi disebut pranata. Pranata adalah suatu sistem norma khusus yang menata suatu rangkaian tindakan berpola mantap guna memenuhi suatu kepentingan khusus dari manusia dalam kehidupan masyarakat, sedangkan lembaga atau institut adalah badan atau organisasi yang melaksanakan aktivitas itu.<sup>33</sup> Dalam hal ini SGKP Pius X adalah lembaga sosial pendidikan yang memberikan pengajaran dimana suatu organisasi umumnya bertujuan untuk mengembangkan dan membina kehidupan beragama. SGKP Pius X Magelang dibentuk dengan sengaja dan atas kesadaran anggotanya untuk memenuhi tujuan tertentu yaitu melaksanakan misi pendidikan dan pengajaran. Baik itu pengajaran seperti model sekolah lain (ilmu wajib) maupun pengajaran agama Katolik.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pendidikan adalah proses pengubahan sikap dan tata laku seseorang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan.<sup>34</sup> Menurut Undang-undang Nomor 4 Tahun 1950 tentang Dasar-Dasar Pendidikan dan Pengadjaran di Sekolah untuk Seluruh Indonesia, pengertian pendidikan di sekolah adalah pendidikan dan pengajaran yang diberikan kepada murid-murid yang berjumlah sepuluh orang atau lebih. Dalam undang-undang tersebut juga dijelaskan bahwa fungsi pendidikan luar sekolah antara lain memberikan beberapa kemampuan atau

---

<sup>32</sup> John Scott, *Teori Sosial: Masalah-Masalah Pokok dalam Sosiologi* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012), hlm. 168-169.

<sup>33</sup> Koentjaraningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi* (Jakarta: Rineka Cipta, 1990), hlm. 163-165.

<sup>34</sup> Tim Pustaka Phoenix, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Baru* (Jakarta: Media Pustaka Phoenix, 2009), hlm. 263.

keahlian untuk penunjang hidup. Beberapa kemampuan yang diajarkan adalah kemampuan teknis-akademis melalui pelajaran ketrampilan, kemampuan pengembangan kehidupan keagamaan melalui pelajaran agama/moral, kemampuan pengembangan kehidupan sosial budaya melalui pelajaran kesenian dan bela budi, kesatuan antara ucapan dan tindakan. Akhir dari penyelenggaraan pendidikan adalah menciptakan manusia yang berguna bagi orang lain, masyarakat dan negara.<sup>35</sup>

Pendidikan menurut George F. Keller mencakup tiga hal yaitu luas, teknik dan hasil. Luas dalam pendidikan diartikan sebagai suatu tindakan atau pengalaman yang mempunyai pengaruh yang berhubungan dengan pertumbuhan atau perkembangan pikiran (*mind*), watak (*character*), dan kemampuan fisik (*physical ability*) individu. Arti teknis pendidikan adalah proses dimana masyarakat, melalui lembaga-lembaga pendidikan dengan sengaja mentransformasikan warisan budayanya yaitu pengetahuan, nilai-nilai dan ketrampilan-ketrampilan. Sedangkan arti hasil pendidikan adalah apa yang boleh kita peroleh melalui belajar (pengetahuan, nilai-nilai dan ketrampilan-ketrampilan).<sup>36</sup>

Mengacu pada apa yang disampaikan oleh George. F. Keller, SGKP Pius X Magelang dalam hal mengembangkan pemikirannya serta tingkah laku berdasar pada agama Katolik yang merupakan salah satu bidang yang diajarkan oleh sekolah tersebut. Pandangan dalam menumbuhkembangkan pendidikan dijelaskan dalam unsur-unsur pokok semangat dasar pendiri Kongregasi Carolus Borromeus, antara lain: 1) cinta kasih tanpa syarat dan berbela rasa, 2) iman yang dalam, 3) menghargai harkat dan martabat manusia, 4) memiliki daya juang dan ketangguhan dalam menghadapi tantangan hidup, 5) memiliki kemauan untuk

---

<sup>35</sup>Etik Mohareni, "Sekolah Khong Kauw (SKK) Semarang 1950-1979", hlm. 27.

<sup>36</sup>Abu Ahmadi dan Nur Ubhiyati, *Ilmu Pendidikan* (Jakarta: Rineka Cipta, 2001), hlm. 68-69.

maju dan berkembang dengan tekun dan sabar, 6) rela berkorban dan melayani sesama dengan tulus hati.<sup>37</sup>

Keterkaitan agama dengan pendidikan adalah agama berusaha membekali peserta didik agar kelak nanti dijadikan pegangan hidup karena pikiran, sikap dan tingkah laku sangat dipengaruhi oleh pegangan hidup yaitu agama. Dengan begitu ajaran agama yang mampu meningkatkan kualitas pribadi melalui pendidikan maka agama turut menentukan jalannya pendidikan. Namun demikian, pendidikan agama tidak selalu dijadikan tolok ukur perkembangan sekolah karena sekolah juga memiliki bidang pendidikan lainnya yang termasuk non-agama. Semua bidang yang diajarkan tersebut saling bekerja sama sehingga terdapat relevansi terhadap perubahan-perubahan sosial yang terjadi di dalam masyarakat. Untuk membentuk kemampuan fisik, SGKP Pius X Magelang mentransformasikan pendidikan yang diajarkan melalui pendidikan kejuruan yang dibagi menjadi dua jurusan yakni busana dan boga. Masing-masing program kejuruan dibekali oleh pengajaran yang intensif sesuai ketrampilan yang diajarkan sehingga menghasilkan peserta didik yang terampil dan unggul dalam bidang tersebut. Suasana pendidikan yang diwarnai dengan lingkungan keagamaan yaitu Katolik jelas memiliki peran tersendiri bagi para peserta didik.

Sesuai dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1950 tentang Dasar-Dasar Pendidikan dan Pengajaran di Sekolah untuk Seluruh Indonesia, status lembaga sekolah dibedakan menjadi dua yaitu sekolah negeri dan sekolah partikelir (swasta). Lembaga swasta berhak untuk mengatur hidupnya sendiri sejauh itu tidak bertentangan dengan dasar, fungsi dan tujuan pendidikan nasional. Pada dasarnya jenjang sekolah swasta dan waktu belajar tiap jenis sekolah sama dengan sekolah negeri. Isi pendidikan sekolah swasta dan negeri pun sama hanya di sekolah-sekolah swasta tertentu ditambah dengan hikmah cita-cita dari lembaga yang menyediakan tersebut.

SGKP Pius X Magelang termasuk dalam lembaga pendidikan swasta yang memiliki kekhususan pendidikan yaitu kejuruan. Pendidikan di SGKP ditujukan

---

<sup>37</sup>Surani, dkk., *Pedoman Pelaksanaan Spiritualitas CB untuk Pelayanan Pendidikan* (Yogyakarta: CV Media, 2008), hlm. 8.



untuk mengajar di sekolah kependaian putri. Selain pembelajaran yang diberikan berupa materi keguruan, murid juga dibekali dengan beberapa materi kejuruan khusus putri yang nantinya dapat dijadikan bekal jika murid tidak menjadi guru di sekolah kependaian putri. Tujuan pendidikan kejuruan adalah membekali siswa agar memiliki kompetensi perilaku dalam bidang kejuruan tertentu sehingga yang bersangkutan mampu bekerja (memiliki kinerja) demi masa depan dan untuk kesejahteraan bangsa.<sup>38</sup> Siswa dibekali dengan pengetahuan teori mengajar dan ketrampilan praktis guna mempersiapkan mereka setelah lulus sekolah.

Sejalan dengan Undang Undang Sistem Pendidikan Nasional, pendidikan vokasional di Indonesia terdiri atas tiga jenis, yaitu pendidikan kejuruan, vokasi dan profesional. Pendidikan kejuruan merupakan pendidikan menengah yang mempersiapkan peserta didik terutama untuk bekerja dalam bidang tertentu. Pendidikan vokasi merupakan pendidikan yang mempersiapkan peserta didik untuk memiliki pekerjaan dengan keahlian terapan tertentu maksimal setara program sarjana. Pendidikan profesional merupakan pendidikan yang mempersiapkan peserta didik untuk memiliki pekerjaan dengan persyaratan keahlian khusus. Ketiga jenis pendidikan tersebut tujuannya sama yaitu mempersiapkan peserta didik untuk bekerja pada bidang tertentu.<sup>39</sup> Peran dari sekolah swasta kejuruan tidak kalah istimewanya bagi sejarah pendidikan di Indonesia. Eksistensi pendidikan swasta dalam sejarah pendidikan di Indonesia menunjukkan bahwa ada keterkaitan antara sosial, budaya, politik dan pendidikan.

Meminjam teori dari sosiologi, perkembangan adalah bentuk proses sosial yang melukiskan proses perkembangan potensi yang terkandung dalam sistem sosial.<sup>40</sup> Perkembangan merupakan perubahan yang tertuju pada kemajuan keadaan dan hidup anggota masyarakat. Kemajuan-kemajuan mana dimaksudkan

---

<sup>38</sup>Uwe Schippers dan Djajang Patriana, *Pendidikan Kejuruan di Indonesia* (Bandung: Angkasa, 1994), hlm. 19.

<sup>39</sup>Rasto, "Pendidikan Kejuruan", (<http://file.upi.edu>., diakses pada 10 April 2017).

<sup>40</sup>Abdulsyani, *Sosiologi: Skematika, Teori dan Terapan* (Jakarta: Bumi Aksara, 1992), hlm. 115.

untuk dinikmati hasilnya oleh individu-individu. Inti perubahan masyarakat dan perkembangan demi kemajuan anggota masyarakat yang bersangkutan, menemukan penyesuaian diri, menguasai keadaan baru untuk menghindari kekacauan. Langkah pengarahannya perkembangan adalah meyakini bahwa kejadian-kejadian politik-ekonomi, teknik, administratif tidak merupakan kejadian yang lepas satu sama lain, melainkan merupakan kejadian *mutual-independent* atau saling berkaitan.<sup>41</sup> Mengingat SGKP Pius X melaksanakan pendidikan di bawah kebijakan pemerintah, kejadian-kejadian yang ada di dalam SGKP tidak terlepas dari pengaruh keadaan politik negara ataupun faktor lain di luar SGKP.

Kata Katolik berasal dari bahasa Yunani *kath'holou* yang berarti “menyangkut keseluruhan”. Kata tersebut diterapkan pada Gereja dalam arti seluruh atau universal oleh Ignasius dari Antiokhia sekitar tahun 115. Konsili Konstantinopel I (381) menambahkan kata tersebut pada syahadat dalam rumusannya tentang Gereja sebagai “satu, kudus, katolik, dan apostolik”.<sup>42</sup>

Penggunaan kata Katolik pada penelitian ini dimaksudkan untuk menekankan pada Gereja yang mengakui Uskup Roma atau Paus sebagai pemimpin Gereja Katolik atau sebagai kepala utama gereja yang kelihatan, wakil Yesus Kristus di bumi yang merupakan kepala utama gereja yang tidak kelihatan.<sup>43</sup> Secara populer berarti komunitas beriman, Gereja historis yang kelihatan dan tradisi yang hidup yang seluruh akarnya berasal dari Gereja para Rasul. Adanya kerangka konseptual tersebut di atas diharapkan dapat mempermudah kajian permasalahan yang dibahas dalam penelitian skripsi ini.

---

<sup>41</sup> Phil Astrid S. Susanto, *Pengantar Sosiologi dan Perubahan Sosial* (Anggota IKAPI: Binacipta, 1983), hlm. 160-161.

<sup>42</sup> Thomas P. Rausch, *Katolisisme* (Yogyakarta: Kanisius, 2001), hlm. 5.

<sup>43</sup> Maria Octavia S, *SGKP Mater Amabilis, “Sekolah Guru Kepandaian Putri (SGKP) Mater Amabilis Surabaya Tahun 1953-1967”* (Skripsi pada Jurusan Sejarah Fakultas Ilmu Budaya Universitas Airlangga, 2016).

## F. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam menyusun skripsi ini adalah metode sejarah, yaitu proses menguji dan menganalisis rekaman dan peninggalan masa lampau.<sup>44</sup> Metode sejarah mencakup empat langkah, yaitu heuristik (pengumpulan sumber), pengujian sumber (kritik), sintesis dan penulisan (historiografi).<sup>45</sup>

Skripsi yang berjudul “Dari Sekolah Guru Kepandaian Putri (SGKP) ke Sekolah Kesejahteraan Keluarga Atas (SKKA): Studi Lembaga Pendidikan Kejuruan Swasta Katolik di Magelang tahun 1953-1964” ini menggunakan sumber-sumber yang berasal dari sumber arsip, buku, skripsi, jurnal, tesis, majalah, koran, foto, wawancara dan internet. Penelusuran sumber tulisan ini dilakukan di SMK Pius X Magelang. Pada sekolah tersebut penulis memperoleh sumber primer berupa keterangan pendirian SGKP, keterangan mengenai perubahan nama SGKP menjadi SKKA, keterangan dan pemberian bantuan dari pemerintah. Selain itu di sekolah ini juga diperoleh beberapa buku terbitan resmi dari sekolah. Sumber lisan diperoleh melalui wawancara terbuka dengan beberapa alumni SGKP Pius X Magelang. Buku-buku terbitan resmi Yayasan Tarakanita yang berkaitan dengan SGKP juga diperoleh di Kantor Yayasan Tarakanita Cabang Jawa Tengah. Sementara itu penelusuran sumber yang lain dilakukan di Kantor Dinas Pendidikan Kota Magelang, Perpustakaan dan Arsip Kota Magelang, Perpustakaan Kecamatan Grabag Magelang, Perpustakaan Universitas Gajah Mada, *Jogja Library Center*, Perpustakaan Kolese St. Ignatius Yogyakarta dan UPT Perpustakaan Widya Puraya Universitas Diponegoro.

Sumber sejarah yang digunakan dalam penelitian ini dikategorikan menjadi dua macam, yaitu sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer tertulis yaitu berupa arsip. Sumber primer lisan dapat diperoleh melalui wawancara secara lisan dengan orang-orang yang berkompeten. Dalam hal ini peneliti memperoleh informasi langsung dari alumni SGKP Pius X tahun

---

<sup>44</sup>Louis Gottschalk, *Mengerti Sejarah*, terjemahan Nugroho Notosusanto (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1983), hlm. 32.

<sup>45</sup>Nugroho Notosusanto, *Hakekat Sejarah dan Metode Sejarah* (Jakarta: Mega Book Store, 1984), hlm. 22-23.

angkatan 1957 yang berhasil tamat pada tahun 1961. Hasil wawancara ini digunakan sebagai pelengkap sekaligus sebagai pembanding sumber tertulis. Dalam hal ini semakin banyak sumber yang didapatkan semakin baik pula proses penelitian dan penulisan sejarah.<sup>46</sup> Hasil wawancara oleh beberapa orang yang telah diseleksi dibanding-bandingkan sehingga akan memperoleh data yang objektif. Wawancara dilakukan dengan informan yang memiliki tiga kategori yaitu: orang-orang yang terlibat langsung dalam peristiwa; orang-orang yang menyaksikan peristiwa tetapi tidak terlibat langsung dalam peristiwa; dan orang-orang yang tidak terlibat dalam peristiwa tetapi mendapatkan keterangan dari orang yang terlibat langsung. Dalam hal ini peneliti memperoleh informasi dari Kepala Sekolah SMK Pius X Magelang, dan Ketua Bagian Umum Yayasan Tarakanita Cabang Wilayah Jawa Tengah yang memimpin sekarang.

Sumber sekunder dapat diperoleh melalui studi pustaka terhadap buku-buku karya para sarjana dan ahli yang relevan serta artikel-artikel yang dimuat dalam majalah, surat kabar sezaman atau jenis terbitan yang lain. Sumber-sumber ini berguna untuk melengkapi sumber-sumber primer dalam rangka memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai peristiwa yang diteliti.

Setelah pengumpulan sumber dirasa cukup, tahap selanjutnya adalah dilakukan pengujian sumber melalui kritik ekstern dan intern. Kritik ekstern digunakan untuk menguji keaslian sumber, sedangkan kritik intern digunakan untuk memastikan bahwa informasi dalam sumber tersebut dapat dipercaya. Dalam hal ini membanding-bandingkan informasi dilakukan untuk mendapatkan fakta sejarah yang sah.

Kegiatan sintesis menjadi tahap yang ketiga. Dalam tahap ini fakta-fakta sejarah yang relevan disintesis melalui imajinasi, interpretasi dan teorisasi untuk mencari hubungan fakta satu dengan fakta yang lain dalam kerangka hubungan kronologis dan kausalitas. Dengan demikian hubungan antara Yayasan Tarakanita dan perannya dalam pendidikan di Magelang dapat dipahami secara

---

<sup>46</sup> Abdurrahman Suryomihardjo, *Pemahaman Bangsa dan Masalah Historiografi* (Jakarta: Idayu, 1975), hlm. 139.

utuh. Dalam tahap ini penggunaan konsep-konsep dan teori-teori ilmu sosial berguna dalam menjelaskan antarfakta.

Tahap terakhir dalam penelitian sejarah adalah historiografi atau penulisan sejarah. Dalam tahap ini fakta-fakta yang telah disintesis dan dipaparkan dalam bentuk tulisan sejarah dengan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar agar dapat dipahami dengan baik oleh pembaca. Pewujudan tahapan ini sangat dipengaruhi oleh kemampuan dan bakat menulis yang dimiliki oleh seorang peneliti.<sup>47</sup>

### **G. Sistematika Penulisan**

Skripsi berjudul “Dari Sekolah Guru Kepandaian Putri (SGKP) ke Sekolah Kesejahteraan Keluarga Atas (SKKA) Pius X: Studi Lembaga Pendidikan Kejuruan Swasta Katolik di Magelang Tahun 1953-1964” ini terdiri atas lima bab yang saling terkait satu sama lain. Bab pertama merupakan pendahuluan yang berisi uraian mengenai bab latar belakang dan permasalahan; ruang lingkup penelitian yang mencakup ruang lingkup temporal, spasial, dan keilmuan; tinjauan pustaka; kerangka pemikiran; metode penelitian; serta sistematika penulisan yang berisi pokok-pokok pembahasan yang dipaparkan pada masing-masing bab.

Bab II berjudul Latar Belakang Terbentuknya SGKP Pius X Magelang. Bab ini berisi gambaran umum mengenai kondisi pendidikan pasca proklamasi kemerdekaan. Pembahasan yang dijelaskan dalam bab ini meliputi keadaan pendidikan tingkat menengah pasca proklamasi kemerdekaan, penyebaran agama Katolik, dan sekolah-sekolah agama Katolik di Magelang. Pada bab ini juga dipaparkan profil Suster-suster Carolus Borromeus serta Yayasan Tarakanita sebagai induk dari SGKP Pius X Magelang.

BAB III berjudul Perkembangan SGKP Pius X Magelang tahun 1953-1964. Bab ini memuat pembahasan mengenai pendirian SGKP Pius X pada tahun 1953 hingga perubahan sekolah menjadi SKKA pada tahun 1964. Pembahasan tersebut meliputi keadaan fisik SGKP Pius X, sistem pembelajaran, dan tenaga

---

<sup>47</sup> Sartono Kartodirjo, *Pemikiran dan Perkembangan Historiografi Indonesia: Suatu Alternatif* (Jakarta: Gramedia, 1982), hlm. 60-61.

ajar serta siswa SGKP Pius X. Pada bab ini juga dibahas mengenai faktor utama diubahnya SGKP Pius X menjadi SKKA Pius X Magelang.

BAB IV berjudul Upaya Peralihan SGKP Pius X menjadi SKKA Pius X Magelang. Pada bab ini mencakup bagaimana upaya-upaya yang dilakukan pihak sekolah maupun pihak yayasan selama masa peralihan termasuk di dalamnya masalah perubahan pembelajaran, siswa-siswi sebelumnya dan dampak yang ditimbulkan dari adanya perubahan tersebut.

BAB V atau bab terakhir dalam skripsi ini adalah penutup. Bab ini berisi kesimpulan dari bab-bab sebelumnya. Simpulan ini dimaksudkan sebagai jawaban dari pertanyaan-pertanyaan penelitian berdasarkan pembahasan yang disajikan dalam skripsi ini.